



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

STRATEGI MENJAGA STABILITAS STOK BERAS NASIONAL

Ari Mulianta Ginting
Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menjelaskan bahwa cadangan beras yang dimiliki Bulog terus mengalami penurunan karena disalurkan untuk program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga yang dijalankan oleh Bulog. Setelah melakukan rapat dengan Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartato pada awal November 2022, Perum Bulog diperkenankan melakukan impor dengan kuota 500 ribu ton untuk menambah cadangan berasnya. Namun dengan catatan, Perum Bulog harus tetap menyerap pasokan beras yang berasal dari dalam negeri.

Perum Bulog menilai impor perlu dilakukan untuk meningkatkan stok beras guna mengendalikan harga di tingkat konsumen. Stok cadangan beras pemerintah, tanpa adanya pengadaan impor, hanya sekitar 300.000 ton di akhir tahun dan penyerapan dalam negeri sebanyak 150.000 ton. Dengan demikian, jumlah total stok beras tanpa impor berjumlah sekitar 450.000 ton. Wacana impor beras ini menjadi salah satu isu krusial yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 23 November 2022.

Isu impor beras ini menjadi penting karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras secara nasional diperkirakan berjumlah 31,9 juta ton pada tahun ini. Jumlah produksi beras secara nasional tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras secara nasional yang berjumlah 30,2 juta ton. Hal ini berarti ada surplus produksi beras kurang lebih sebesar 1,2 juta ton di tahun ini. Lebih lanjut Kementerian Pertanian menerbitkan siaran pers terbaru yang menjelaskan bahwa stok beras di beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan Bulog. Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Batara Siagian menyebutkan bahwa petani lokal masih dapat menyuplai kebutuhan beras Bulog secara nasional.

Rencana impor beras juga mendapat penolakan dari Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santoso yang menyebutkan bahwa impor beras akan berdampak negatif terhadap petani karena impor akan mendorong harga gabah di tingkat petani menjadi murah. Apalagi pada bulan Februari 2023 akan memasuki masa panen raya untuk beras di Indonesia. Kementerian Perdagangan melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah memutuskan impor dan membeli beras dari luar negeri karena stok beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton. Jika di bawah jumlah tersebut maka dapat mendorong kenaikan inflasi pangan.

Kondisi objektif yang dihadapi yaitu adanya ketidaksepahaman antara Bulog dan Bapanas dengan Kementerian Pertanian. Permasalahan ini harus dikembalikan kepada persamaan, bahwa:

$$\text{Produksi} - \text{Konsumsi} = \text{Ekspor} - \text{Impor} + \text{Stock}$$

Apabila kita asumsikan bahwa ekspor maupun impor sama dengan nol maka didapatkan:

$$\text{Produksi} - \text{Konsumsi} = \text{Stock}$$

Persamaan ini menunjukkan apabila terjadi surplus beras di Indonesia saat ini maka seharusnya stok akan bertambah. Namun, kondisi riil per 5 Desember 2022 menunjukkan bahwa data stok beras di Bulog menyusut. Surplus beras yang diprediksi oleh BPS sebesar 1,7 juta ton beras selama tahun 2022 juga bisa meleset dalam perhitungan. Hal ini dikarenakan data BPS adalah angka prediksi yang memiliki *margin error* dari prediksi mereka. Jika diasumsikan *standard error* 6 persen maka surplus beras pada tahun 2022 dapat berubah menjadi defisit.

Atensi DPR

Rencana impor beras oleh Perum Bulog menjadi sumber ketidaksepahaman antara Bulog, Bapanas, dan Kementerian Pertanian. Dalam hal ini, impor beras merupakan opsi pertimbangan manajemen risiko pengelolaan beras untuk menjadi stok beras nasional. Periode tiga bulan (Desember 2022 - Februari 2023) sebelum panen raya merupakan musim paceklik yang berarti produksi beras lebih rendah daripada konsumsi. Bulog akan melakukan operasi pasar untuk mencegah terjadi kenaikan harga beras di masyarakat.

Komisi IV DPR RI perlu memerhatikan opsi kebijakan impor beras secara cermat. Kebijakan ini dilematik dan bisa diperdebatkan, namun Bulog harus menjaga stok beras nasional hingga tingkat aman sekitar 1,5 juta ton. Opsi kebijakan impor merupakan strategi untuk mengantisipasi kebutuhan beras selama 3 - 4 bulan ke depan dan antisipasi kebutuhan untuk bencana alam. Selain itu, Komisi VI DPR RI perlu mendorong evaluasi kebijakan menyeluruh dari sistem pengelolaan beras nasional guna menjaga ketahanan pangan dan meredam inflasi akibat kenaikan harga beras.

Sumber

Kompas, 5 & 6 Desember 2022;

Koran Tempo, 30 November & 1 Desember 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Monika Suhayati
Venti Eka Satya

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022